

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata “pemimpin” yang berarti bimbingan atau arahan serta istilah “pemimpin” yang merujuk pada individu yang bertanggungjawab dalam memimpin, membimbing, atau mengarahkan. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar memahami tugas yang harus dilakukan, termasuk prosedur pelaksanaan dan cara mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, seseorang yang menduduki posisi kepemimpinan harus memiliki keterampilan dalam memotivasi serta mendorong seseorang untuk menjalankan tugas dan melaksanakan program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemimpin adalah orang yang memimpin sedangkan kepemimpinan adalah perihal pemimpin dan cara memimpin. Dengan demikian, pemimpin merupakan seseorang yang beri kepercayaan ketua dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan kepemimpinan sedangkan kepemimpinan merupakan seni, teknik, dan

⁷ Ki Hari Sulaksono, *Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016), 6–7.

metode memimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah lembaga atau organisasi karena kepemimpinan mampu mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan bersama.⁸

Walter C. Wright mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah relasi di mana seseorang berupaya mempengaruhi pikiran, kebiasaan, keyakinan atau nilai-nilai lain.⁹ Kepemimpinan adalah suatu kebutuhan mendasar bagi manusia dalam konteks kehidupan sosial mereka. Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki keberagaman dalam kemampuan dan potensi individu. Ada yang secara alami memiliki bakat dalam memimpin, mampu mengambil inisiatif dan mengarahkan kelompok. Oleh karena itu, penting untuk perlu diakui bahwa keberadaan seorang pemimpin tidak hanya memenuhi kebutuhan organisasi atau sosial, tetapi juga merupakan respons alami terhadap kebutuhan akan pengarahan dan koordinasi dalam struktur sosial manusia.

R. Soekarno Indrafachrudi menyatakan bahwa kepemimpinan dapat dipahami sebagai proses membimbing suatu kelompok secara terarah guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹⁰ Menurut Maman Ukas menyatakan bahwa kepemimpinan mencerminkan kemampuan individu

⁸ Suparman, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Guru* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 9.

⁹ Sudomo D. Min, *Ciri Utama Kepemimpinan Sejati* (Yogyakarta: Pelita Harapan, 2005), 26.

¹⁰ Suparman, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Guru*, 10.

dalam memengaruhi orang lain agar bersedia melakukan tindakan yang mendukung pencapaian tujuan tertentu.¹¹

Mayjend. (Purn) Soedarsonor menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan atau membimbing orang lain untuk bekerja secara optimal dan mudah, sesuai dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien.¹²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, meyakinkan dan mengarahkan individu atau kelompok agar bekerja sama secara sukarela dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya melibatkan pengaruh terhadap perilaku, tetapi juga terhadap nilai, keyakinan, dan kebiasaan individu, serta mencakup tugas-tugas manajerial seperti merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, dan mengendalikan yang dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan proses sosial yang kompleks, yang menuntut pemimpin untuk memiliki kemampuan interpersonal, manajerial, dan etika yang tinggi guna menciptakan sinergi dalam tim dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹¹ Ibid., 11.

¹² Ibid., 12.

B. Kepemimpinan Tallu Batu Lalikan

Seperti yang kita ketahui bahwa, kepemimpinan *tallu batu lalikan* yang terdiri dari pemerintah, agama dan adat. Dari ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan dan telah memiliki peran masing-masing dengan tujuan secara bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di dunia.

Tallu Batu Lalikan (*tallu*=tiga, *batu*=batu, *lalikan*=tungku dapur) merupakan satu konsep yang baru muncul pada acara *ma'kombongan kalua'* di Toraja pada Tahun 2013 sebagai bagian dari perayaan memperingati 100 Tahun Injil Masuk Toraja. Awalnya dipegang satu orang hingga akhirnya dibagi tiga bagian yaitu Pemerinta, Adat, dan Agama.¹³ Tanggung jawab mengenai *Aluk* dipegang oleh tokoh agama yakni Majelis Gereja, untuk adat dipegang oleh pemangku adat dan rekan kerjanya, sementara pemerintah diemban oleh pemerintah seperti aparat lembang. Setelah perubahan ini, maka banyak hal yang turut berubah dalam masyarakat Toraja. Secara konkret dapat dilihat dalam hal mantaa duku secara fisikanya *Buku Leso*. *Buku Leso* adalah tulang sendi dari kerbau yang memiliki banyak danging yang mempunyai nilai yang mempunyai nilai tertentu pada pesta Rambu Solo' dan Rambu Tuka' di Toraja. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika *Aluk, ada'* dan

¹³ Sepriadi Bunga' Petrus Tiranda Dan Grory Cristi Ayamiseba, "Revitalisasi Kepemimpinan Tallu Batu Lalikan Mengatasi Krisis Lingkungan Di Toraja," *Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Masyarakat* 5 No 1. (2025): 27.

pemerintah dipegang oleh satu orang, maka *Buku Leso* hanya diberikan kepada satu orang dan yang berhak menerimanya.¹⁴

Kepemimpinan *Tallu Batu Lalikan* mempresentasikan hubungan erat antara agama, adat, dan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan dalam konsep *Tallu Batu Lalikan* tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan antara agama, adat, dan pemerintah, tetapi juga menuntut adanya pemahaman bersama untuk membangun masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual.¹⁵

Kepemimpinan *Tallu batu lalikan* tentu bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Toraja. *Tallu Batu Lalikan* terdiri dari tiga unsur antara lain:

1. Pemerintah

- a. Pengertian Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah dapat diartikan sebuah sistem dalam pelaksanaan kekuasaan dan wewenang untuk mengelola dimensi sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas dalam menjalankan kekuasaan. Dalam konteks pemerintah daerah, pemerintahan memegang peran penting

¹⁴ Theodorus Kobong, *Injil Dan Tongkonan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2022), 109.

¹⁵ Resky Purnama & Rannu Sanderan, *Pembinaan Masyarakat Dalam Pendampingan Budaya Tallu Batu Lalikan* (Desa Sopai, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, 2022).

dalam meningkatkan mutu pengelolaan berdasarkan rencana yang telah disusun guna mencapai tujuan bersama.¹⁶ Di dalam struktur pemerintahan, terdapat sosok pemimpin yang berperan sebagai teladan dan panutan bagi masyarakat.

Pemerintah adalah pejabat pemerintah daerah terkait yang mempunyai wewenang formal untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemerintah daerah terdiri dari perangkat daerah, yang merupakan penyelenggara pemerintah daerah dan merupakan unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Gubernur, bupati dan walikota juga merupakan anggota pemerintah daerah.

Yohanes Calvin mengeluarkan sebuah pernyataan sekaitan dengan pemerintah. Yohanes Calvin berpendapat bahwa peran utama seorang pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Pejabat pemerintah harus menjadi pelindung dan pebela kepada rakyat serta mewujudkan kasih di tengah-tengah masyarakat. Dalam pemerintah tidak luput dari Undang-undang, dan Calvin mendukung jika undang-undang dijadikan sebagai alat untuk membantu dalam memberikan keadilan.¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 20.

¹⁷ Hall, *Pengaruh Di Dunia Modern*, n.d., 15.

Menurut Calvin pemerintah harus dibatasi dalam tugas dan lingkungannya. Calvin dalam khotbahnya menekankan bahwa ada batas yang ditetapkan oleh Allah bagi kekuasaan pemerintah (raja-raja), seperti bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah serta mengarahkan rakyat dalam kejujuran dan keadilan yang sesungguhnya, pemerintah harus menyadari bahwa mereka berada di bawah kuasa dan kendali Allah.¹⁸

b. Peran Pemerintah

Pemerintah Indonesia memiliki peran yang diatur dalam UUD 1945. Salah satu peran utama pemerintah adalah sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan kebutuhan wilayah negara. Dalam pasal 1 ayat 3, dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan fungsi-fungsinya berdasarkan hukum yang berlaku. Ini berarti pemerintah harus menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Selain itu, pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.¹⁹

¹⁸ Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, n.d., 313.

¹⁹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945.

c. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Berdasarkan UUD 1945, pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 menyebutkan bahwa tugas pemerintah adalah:

- 1) Menjaga dan melindungi seluruh rakyat Indonesia serta seluruh wilayah tanah airnya.
- 2) Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
- 3) Mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan bangsa.
- 4) Berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan pada asas kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial.²⁰

Berdasarkan UU No. 23 tentang pemerintah, UU ini memperjelas tugas dan fungsi pemerintah diantaranya adalah:

- 1) Melaksanakan urusan pemerintah umum, seperti menjaga kebutuhan NKRI, membina persatuan dan kesatuan, serta menjamin ketertiban dan keamanan.
- 2) Menjalankan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan lain-lain.
- 3) Menyelenggarakan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata.

²⁰ Ibid.

- 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program ekonomi, sosial, dan infrastruktur.²¹

Menurut Rasyid pemerintah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengaturan, atau fungsi pengaturan dalam berbagai bentuknya bertujuan untuk membentuk kondisi yang mendukung agar berbagai aktivitas dapat berlangsung dengan baik, serta mewujudkan tatanan sosial yang tertib dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- 2) Pelayanan yang diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat.
- 3) Pemberdayaan dan pembangunan yang diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dan membangun.²²

Menurut Soewargono dan Djohan dinyatakan salah satu peran utama pemerintah adalah merumuskan dan menjalankan kebijakan publik. Argumentasi utama dalam hal ini adalah bahwa kebijakan publik yang dibuat pemerintah akan digunakan oleh semua warga negara. Setiap kebijakan publik diperhitungkan pada kepentingan umum. Pemerintah memiliki peran penting dalam

²¹ *Undang-Undang No. 23 Tentang Pemerintah Daerah* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2014), 25–35.

²² Dr. Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Depok Rajawali: Perpustakaan Nasional, 2017), 34.

menyediakan dan melayani kebutuhan masyarakat. Karena rakyat adalah pemegang saham negara, pemerintah harus melayani masyarakat. Demikianlah posisi rakyat adalah pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi atas masyarakat.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, mandiri, dan sejahtera melalui fungsi utamanya yaitu pengaturan, pelayanan, serta pemberdayaan dan pembangunan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, rakyat memegang posisi sentral sebagai pemilik kedaulatan negara, sehingga pelayanan publik menjadi kewajiban utama pemerintah.

2. Tokoh Agama

a. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh Agama merupakan individu yang dihormati dan di percaya dalam menyampaikan pemahaman ajaran agama kepada umat, serta dikenal karena pengetahuan dan pengamalannya yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.²⁴

²³ Ibid., 38.

²⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu? Edisi Baru* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 10–11.

Peran penting tokoh agama dalam kehidupan masyarakat adalah membimbing masyarakat untuk memiliki akhlak atau perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, baik dalam kehidupan keluarga maupun ditengah masyarakat, menyampaikan pesan-pesan agama secara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan di kalangan masyarakat, mengembangkan generasi penerus yang memiliki pemahaman yang mendalam dan menerapkan ajaran agama dengan benar serta berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang membutuhkan ajaran agama.²⁵ Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku keagamaan masyarakat. Dengan pengetahuan dan perilaku yang baik, mereka tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga panutan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan tokoh agama sangat penting untuk menjaga nilai-nilai keagamaan dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat.²⁶

b. Peran Tokoh Agama

Tokoh Agama memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks moral dan spiritual. Mereka

²⁵ Elli Stiadi, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 34.

²⁶ Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat, Edisi Kedua* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 28.

berfungsi sebagai pemimpin spiritual yang memberikan bimbingan kepada umat dalam menjalani kehidupan. Selain itu, tokoh agama juga berperan sebagai pemberi nasehat dalam berbagai aspek kehidupan. Tokoh agama juga memiliki peran penting dalam mendorong keadilan sosial. Tokoh agama juga sering kali menjadi suara bagi masyarakat yang terpinggirkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, seperti pengatasan kemiskinan, pendidikan, dan perdamaian.²⁷

Menurut Azyumardi Azra menekankan bahwa tokoh agama harus berperan aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Menurutnya, keterlibatan tokoh agama dalam kehidupan publik dapat membantu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tokoh agama tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek spiritual, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan dan ekonomi.²⁸

Menurut Harold D. Lasswell menyatakan bahwa tokoh agama berperan sebagai *Opinion Leader* atau pemimpin opini, yang

²⁷ Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Gema Insani Press, 1996), 26–29.

²⁸ Azra Azyumardi, *Agar Umat Tidak Salah Memahami Agamanya* (Bandung: Mizan, 2000), 135–140.

dapat memengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat, terutama dalam isu-isu moral, etika, dan kebijakan publik.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran tokoh agama seharusnya menjadi agen perubahan dan pemimpin opini yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap arah kebijakan publik, moralitas, serta kesejahteraan sosial. Keterlibatan mereka penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, etis, dan sejahtera.

c. Tugas dan Fungsi Tokoh Agama

Menurut Kuntowijoyo tugas dan peran tokoh agama adalah sebagai berikut:

- 1) Mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik melalui pendekatan keagamaan.
- 2) Sebagai pendidik moral dan etika, tidak hanya lewat khotbah atau ceramah, tetapi juga lewat tindakan dan keteladanan.
- 3) Menjadi jembatan antara nilai-nilai agama dan kehidupan sosial-politik.³⁰

Menurut Max Weber tugas dan fungsi tokoh agama adalah sebagai berikut:

²⁹ Harold D. Lasswell, *Propoganda Technique In The World War* (Chicago: Universitas Of Chicago Press, 1927), 75–85.

³⁰ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 102–110.

- 1) Sebagai pemimpin spiritual yang mengarahkan umat dalam memahami ajaran agama.
- 2) Menajdi agen perubahan sosial, karena ajaran agama bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku ekonomi masyarakat.
- 3) Sebagai penggerak institusionalisasi agama, yang berperan dalam pembentukan dan pengelolaan organisasi keagamaan.³¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi tokoh agama adalah membimbing umat secara moral, menjadi teladan, menjembatani agama dengan aspek sosial-politik, serta mendorong pembentukan dan pengelolaan intitusi keagamaan.

3. Tokoh Adat

a. Pengertian Tokoh Adat

Tokoh Adat merupakan individu yang menduduki suatu posisi atau memiliki peran tertentu dalam struktur adat yang memainkan peran penting dalam struktur masyarakat di suatu daerah, sehingga tokoh adat menjadi kelompok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.³²

Tokoh Adat adalah individu yang memegang peranan penting dalam memelihara dan mengelola tatanan kehidupan

³¹ Weber Max, *The Sociology Of Religion* (Boston: Beacon Press, 1963), 23–26.

³² & Syahbudin Rosnita, Salimin, *Peranan Tokoh Adat Dalam Perkawinan Pinang* (Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, 2020), 13.

masyarakat adat. Mereka berperan sebagai pemimpin yang diandalkan dalam membimbing komunitas ke arah yang lebih baik, terutama dalam aspek sosial dan budaya. Keberadaan tokoh adat sangat dibutuhkan karena mereka memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola kehidupan bermasyarakat.³³

Tokoh Adat bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai tradisional, menyebarkan norma-norma adat, serta membantu menangani dan menyelesaikan perselisihan yang muncul di tengah masyarakat. Selain itu, tokoh adat juga berperan dalam memimpin upacara adat, mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti pernikahan, kematian, serta masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan serta kelangsungan adat dan budaya di masyarakat.³⁴

Tokoh Adat memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat. Mereka bertindak sebagai moderator dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan musyawarah, sehingga ketertiban harmoni tetap terjaga. Selain dalam aspek sosial, tokoh adat juga memiliki pengaruh dalam aspek

³³ D & Junaidi Artina, *Peran Tokoh Adat Dalam Pembentukan Desa* (Kecamatan Ukui Kabupaten Pelawawan, 2017), 1.

³⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 45.

politik dalam pemerintahan lokal, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh sistem adat sebagai bagian dari struktur kepemimpinan. Mereka sering menjadi bagian dari penasehat dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut kepentingan masyarakat.³⁵

b. Peran Tokoh Adat

Peran tokoh adat memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern yang masih memegang nilai-nilai budaya.

Menurut Koentjaraningrat tokoh adat adalah pemimpin tradisional yang memiliki peran memelihara dan merawat kelestarian nilai-nilai budaya, tradisi adat, serta norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh adat sering menjadi penengah dalam konflik dan penentu keputusan penting berbasis adat.³⁶

Menurut Soekanto tokoh adat memiliki peran sebagai mengatur kehidupan sosial dan hukum adat masyarakat. Tokoh adat menjadi representasi kekuasaan non-formal yang dihormati dan ditaati karena keahlian, kearifan, dan kedudukannya secara sosial.³⁷

³⁵ Agus Rohman, *Pergeseran Peran Tokoh Adat Dalam Sosial Budaya*, 2013, 71.

³⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmuh Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 115.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 377.

Menurut Clifford Geertz menekankan bahwa tokoh adat adalah simbol dari ikatan budaya dan identitas komunitas. Tokoh adat memainkan peran penting dalam ritus, upacara keagamaan, dan pelestarian simbol-simbol budaya lokal.³⁸

Menurut Heddy Sfri Ahimsa-Putra menyatakan bahwa tokoh adat tidak hanya berperan dalam tataran budaya dan sosial, tetapi juga dalam proses mediasi antara nilai-nilai tradisional dengan perkembangan modernitas. Tokoh adat menjadi aktor penting dalam menjaga keberlanjutan identitas komunitas.³⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran tokoh adat sangat penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan sosial, budaya, dan hukum di tengah masyarakat. Para ahli sepakat bahwa tokoh adat bukan hanya sebagai penjaga tradisi dan pemimpin formal, tetapi juga sebagai mediator, simbol identitas budaya, serta penghubung antara nilai lokal dan tantangan modernitas. Dengan kearifan dan kedudukan sosialnya, tokoh adat menjadi sosok yang dihormati serta berperan strategis dalam membentuk harmoni dan kesinambungan dalam masyarakat.

³⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation Of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 89.

³⁹ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Sruktur Dan Makna: Esai-Esai Antropologi Budaya* (Yogyakarta: Kepel Press, 2006), 203.

c. Tugas dan Fungsi Adat

Menurut Ter Haar tugas dan fungsi adat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menegakkan hukum adat dan menyelesaikan perkara adat.
- 2) Menjadi sumber rujukan dalam persoalan-persoalan hukum adat.
- 3) Menyusun, menjaga, dan menafsirkan kaidah-kaidah hukum adat.⁴⁰

Menurut Soerjono Soekanto tugas dan fungsi adat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengawasi pelaksanaan norma adat dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Memberikan sanksi sosial kepada pelanggar adat.
- 3) Mengarahkan masyarakat agar hidup sesuai norma, etika, dan kebiasaan lokal.
- 4) Sebagai figur panutan yang ditaati dan di hormati oleh masyarakat.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat berfungsi sebagai pengontrol sosial yang mengawasi

⁴⁰ B. Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 90–95.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 45–50.

pelaksanaan norma-norma adat, memberikan sanksi sosial, serta menjadi figur panutan yang dihormati. Di sisi lain, tokoh adat juga berfungsi sebagai otoritas utama dalam menafsirkan, menyusun, dan menegakkan hukum adat, serta menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat.

C. Pertambangan

Pertambangan merupakan aktivitas yang melibatkan penggalian tanah untuk memperoleh hasil berupa bahan tambang. Kegiatan ini, termasuk salah satu aktivitas utama manusia yang muncul bersamaan dengan pertanian. Karena itu, pertambangan memiliki hubungan erat dengan kehidupan dan peradaban manusia. Kegiatan ini juga tergolong unik, karena sebaran endapan bahan tambang di dalam kerak bumi umumnya tidak merata.⁴²

Sumber Daya (endapan bahan galian) mempunyai ciri unik dibandingkan sumber daya lainnya. Ciri yang dimaksud adalah bahwa sumber daya mineral adalah bahan galian yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Dengan kata lain, jika mengendapkan bahan galian ditambang disuatu tempat, sumber daya tambang tersebut bersifat tidak terbarukan, atau merupakan bahan industri utama yang tidak dapat didaur ulang. Oleh karena itu, lokasi, jenis, jumlah, dan kualitas

⁴² Andi Ilham Samanlangi, *Sistem Pertambangan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 6–10.

material yang digunakan oleh industri pertambangan selalu sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam manajemen sumber daya mineral, penerapan sistem pertambangan yang tepat dan sesuai, baik dari segi teknis maupun ekonomi, diperlukan untuk mengoptimalkan keuntungan dalam meningkatkan keselamatan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.⁴³

Industri pertambangan bertujuan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya mineral yang terdapat di dalam lapisan bumi demi meningkatkan kesejahteraan manusia. Kegiatan ini, ketika dilakukan di suatu daerah, akan membawa dampak terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, baik dalam bentuk positif maupun potensi negatif.

Adapun dampak positif dan negatif dari adanya rencana pembangun tambang antara lain:

1. Dampak Positif dari penambangan adalah kegiatan penambangan yang memberikan sejumlah manfaat, seperti meningkatkan pendapatan serta devisa negara, membuka peluang kerja, memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal, mendukung perkembangan teknologi, mendorong pertumbuhan wilayah, serta mempermudah akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Dampak negatif dari penambangan adalah merusak lingkungan hidup, seperti hilangnya tanah yang subur, hilangnya vegetasi yang

⁴³ Ibid., 8–9.

mengakibatkan daerah menjadi gundul sehingga mudah longsor, dan menjadikan tanah menjadi kurang subur.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., 11.